

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

kemiskinan merupakan permasalahan atau isu global dan hal itu juga yang terjadi di Indonesia. Konferensi Dunia tentang Pembangunan Sosial yang diadakan di Kopenhagen pada bulan Maret 1995, yang mendefinisikan kemiskinan sebagai keadaan di mana seseorang tidak mampu menjalani kehidupan normal secara layak.¹ Kemiskinan sendiri adalah keadaan di mana seseorang atau sekelompok orang tidak memiliki sumberdaya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal yang layak serta akses pendidikan dan layanan kesehatan.

Kemiskinan merupakan satu kejadian/fenomena yang dialami oleh seseorang individu/kelompok masyarakat tanpa kerelaan dan kehendak mereka sendiri. Kemiskinan dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu secara material dan bukan material. Miskin secara material terdiri daripada miskin pendapatan dan bukan pendapatan yaitu pendidikan, akses kepada kesehatan, pekerjaan dan kemudahan awam. Manakala miskin bukan material ialah berkait berkenaan ciri-ciri seperti emosi, psikologi dan rohani. Kesemua keadaan yang berlaku ini menyebabkan seseorang yang miskin mengalami kesukaran untuk keluar dari situasi kemiskinan sekiranya tiada tindakan yang dilakukan oleh pihak bertanggungjawab. Pengukuran kemiskinan adalah langkah awal dalam mengenal pasti golongan miskin.²

¹ Zulkiflimansyah Zulkiflimansyah dan Ahmad Yamin, "Pola Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Studi Pada Penerima Manfaat (KPM) Melalui Kegiatan Pertemuan Di Desa Suka Damai", *JHIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol 6, No.6 (Juni 2023) Universitas Teknologi Sumbawa Indonesia, h.3821.

² Parthiban S Gopal dan others, "Kemiskinan Adalah Satu Fenomena Multidimensi: Suatu Pemerhatian Awal", *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)*, vol.6, No.1 (Januari 2021) Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan, Universiti Sains Malaysia (USM), h.40.

Dari pengertian di atas dapat kita ketahui bahwa kemiskinan adalah kondisi individu atau kelompok yang tidak memiliki cukup sumber daya yang dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yakni kebutuhan pokok seperti sandang pangan dan papan, serta tidak memiliki cukup biaya untuk mengakses layanan kesehatan dan pendidikan. Kemiskinan seperti yang kita ketahui dapat bersifat absolut di mana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi standar untuk bertahan hidup, atau relatif. Yang dimaksud disini adalah kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang hanya memiliki harta lebih sedikit atau kemampuan yang lebih sedikit dibanding dengan standar hidup yang ada di masyarakat. Seperti yang telah dijelaskan di atas beberapa faktor yang menyebabkan kemiskinan adalah kurangnya akses terhadap pendidikan, pekerjaan atau lapangan kerja yang tidak memadai serta ketidakadilan sosial.

Ada beberapa faktor yang dapat menjadi alasan terjadinya kemiskinan, dan faktor itu dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu faktor kultural dan faktor struktural. Penyebab dari kemiskinan dengan faktor kultural diantaranya adalah rendahnya pendidikan, sumber daya manusia yang rendah, tidak adanya diversifikasi pekerjaan serta semangat prestasi yang rendah. Adapun faktor secara struktural di antara lain adalah kurangnya lapangan pekerjaan dan bantuan yang tidak merata.³

Di atas disebutkan bahwa rendahnya pendidikan dapat menjadi salah satu faktor kemiskinan hal ini dikarenakan apabila seseorang mempunyai pendidikan yang rendah maka akses individu kepada pekerjaan baik dengan gaji yang lebih tinggi akan terbatas pula, selain itu sumber daya manusia yang rendah juga menjadikan keterampilan seseorang menjadi kurang sehingga tidak mampu bersaing dengan standar yang dibutuhkan oleh instansi atau perusahaan, orangtua dengan pendidikan yang rendah juga cenderung tidak dapat memberikan akses pendidikan yang baik kepada keluarganya, sehingga kemiskinan yang dialami akan diturunkan ke generasi berikutnya.

³ Sri Rejeki, 'Pilihan Rasional Petani Miskin Pada Musim Paceklik', *Jurnal Analisa Sosiologi*, Vol 8, No.2 (2019), h.185.

Hasil dari peraturan Presiden No. 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan adalah salah satu prioritas pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan kesempatan kerja bagi masyarakat miskin secara mandiri. Hal ini menunjukkan pentingnya peran pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan untuk menanggulangi kemiskinan.⁴

Dari pengertian di atas dapat kita ketahui bahwa penanggulangan kemiskinan adalah serangkaian program atau kebijakan yang dirancang oleh pemerintah untuk mengurangi atau menghilangkan kemiskinan di suatu daerah atau dalam sebuah negara. Program ini biasanya mencakup beberapa aspek, seperti meningkatkan pendidikan, menyediakan layanan kesehatan, memberdayakan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta adanya jaminan sosial dan pembangunan infrastruktur yang rata.

Jadi, pemerintah juga berusaha untuk menanggulangi kemiskinan yang ada di negara kita, terbukti dengan diadakannya undang-undang yang tersebut di atas, merupakan bukti nyata adanya usaha pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan yang terjadi. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu dari berbagai macam program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, pemberdayaan masyarakat telah diujicobakan melalui PKH. Pemerintah berharap dengan adanya pemberdayaan ini, para peserta program dapat segera mewujudkan masyarakat yang berdaya dan mandiri untuk lepas dari kemiskinan yang selama ini menjadi permasalahan yang belum terselesaikan.⁵

⁴ Alman Manongga dan Dkk, "Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Kelurahan Pinokalan Kota Bitung", *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Vol 1, No.1 (2018) Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi, h. 2.

⁵ Arif Citra Permana, Cahyo Sasmito, and Cakti Indra Gunawan, "Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Program Keluarga Harapan Untuk Memutus Rantai Kemiskinan Di Kota Malang (Studi Di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)", *MADANI: Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol 10, No.2 (2018) Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang, h.64.

Program Bantuan Keluarga Harapan (PKH) dirancang oleh pemerintah untuk memberikan akses yang seimbang dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan lainnya kepada warga masyarakat yang kurang beruntung secara ekonomi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa mereka memiliki akses yang setara dengan hak dan kedudukan mereka sebagai warga negara, serta meningkatkan kesejahteraan sosial secara menyeluruh.

Pemerintahan desa merupakan pondasi utama dalam struktur pemerintahan Indonesia, yang mempunyai posisi sangat penting untuk kesuksesan pembangunan nasional secara menyeluruh. Kemampuan aparat desa yang terus berusaha disempurnakan, dalam bidang administrasi, penguatan partisipasi masyarakat, dan pengembangan lembaga desa merupakan aspek krusial dalam pembangunan di tingkat desa. Aparat desa yang bertanggung jawab sebagai pelaksana administrasi, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Kehadiran aparat desa dalam bidang administrasi sangat penting karena mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang kondisi dan permasalahan di wilayah mereka.⁶

Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia nomor 84 tahun 2015 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa, struktur organisasai dan tata kerja pemerintahan desa adalah suatu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja. Pemerintah desa adalah kepala desa dibantu oleh perangkat atau aparat desa yang berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala desa yang terdiri atas sekertariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.⁷

Desa Sindangwangi, kecamatan muncang, kabupaten Lebak, Banten, dipimpin oleh seorang kepala desa yang disebut oleh warga sebagai *jaro.jaro*, merupakan penyebutan untuk kepala desa yang berasal dari bahasa

⁶ Muh. Fachri Arsjad, "Peranan Aparat Desa Dalam Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa Di Desa Karyamukti Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo", *Gorontalo Journal of Public Administration Studies*, Vol.1, No.1 (April 2018) Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Gorontalo, h.17.

⁷ Muhamad Mu'iz Raharjo, *Tata Kelola Pemerintahan Desa*, ed. by Tarmizi, 1st edn (PT. Bumi Aksara, 2021), h.2.

lokal yang digunakan oleh masyarakat desa sindangwangi, yakni bahasa sunda. Dalam proses kepemimpinannya bapak *jaro* ini dibantu oleh segenap aparat desa dari mulai sekretaris, bendahara, hingga seksi-seksi dalam setiap bidang, serta ada RT dan RW yang bertugas sebagai penanggung jawab di setiap kampung.

Merujuk pada Peraturan Presiden RI No.15 Tahun 2010 tentang percepatan penganggulangan kemiskinan. Sebagaimana yang tertera dalam Pasal 1, bahwa penanggulaangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan besinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Adapun pengertian program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan 2 masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi. Dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dana yang digunakan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸

oleh karena diadakannya program bantuan keluarga harapan atau yang biasa disebut dengan PKH, tentunya aparat desa mempunyai andil dan tanggung jawab mengenai hal ini. Aparat desa bertugas untuk menyampaikan informasi atau sebagai penyalur bantuan program keluarga harapan kepada warga yang berhak menerima bantuan. Penelitian ini dilakukan di Desa Sindangwangi yang terdiri dari empat kampung, salah satu kampungnya bernama kampung Palendeng.

⁸ Fitri Aulia, 'Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Dalam Rangka Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) Di Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan', (Skripsi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan 2018), h.1.

Hasil pengamatan awal kampung Palendeng merupakan kampung yang mendapatkan bantuan dana PKH dari pemerintah, bantuan ini sudah berjalan selama beberapa tahun, Adapun Jumlah data penerima bantuan yang diketahui saat ini menurut catatan yang ada dikantor Desa Sindangwangi secara keseluruhan adalah 239 (Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan) kartu keluarga. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Penerima Bantuan PKH di Desa Sindangwangi

NO	Nama Kelompok Per Kampung Penerima Bantuan	Jumlah Penerima Bantuan
1	Kelompok Palendeng 1 Desa Sindangwangi Kecamatan Muncang	33 Kartu Keluarga
2	Kelompok Palendeng 2 Desa Sindangwangi Kecamatan Muncang	22 Kartu Keluarga
3	Kelompok Sukamaju Desa Sindangwangi Kecamatan Muncang	25 Kartu Keluarga
4	Kelompok Kadu Desa Sindangwangi Kecamatan Muncang	27 Kartu Keluarga
5	Kelompok Sindangwangi 1 Desa Sindangwangi Kecamatan Muncang	25 Kartu Keluarga
6	Kelompok Sindangwangi 2 Desa Sindangwangi Kecamatan Muncang	32 Kartu Keluarga
7	Kelompok Sindangwangi 3 Desa Sindangwangi Kecamatan Muncang	33 Kartu Keluarga
8	Kelompok Sindangwangi 4 Desa Sindangwangi Kecamatan Muncang	28 Kartu Keluarga
Jumlah Penerima Bantuan PKH di Desa Sindangwangi		239 Kartu Keluarga

Sumber: kantor Desa Sindangwangi

Jumlah dalam tabel merupakan data yang bersumber langsung dari kantor Desa Sindangwangi, tabel diatas menjelaskan bahwa jumlah keluarga penerima program bantuan PKH di Desa Sindangwangi ini dibagi menjadi 8 kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok Palendeng 1, dalam kelompok ini terdapat 33 kartu keluarga yang tercatat mendapatkan bantuan PKH, yang kedua kelompok Palendeng 2, dalam kelompok ini terdapat 22 kartu keluarga yang mendapat bantuan PKH, yang ketiga kelompok Sukamaju, dalam kelompok ini terdapat 25 kartu keluarga yang mendapat bantuan PKH, yang ke empat kelompok Kadu, dalam kelompok ini terdapat 27 kartu keluarga penerima bantuan PKH, yang ke lima kelompok Sindangwangi 1, dalam kelompok ini terdapat 25 kartu keluarga yang mendapatkan bantuan PKH, yang ke enam kelompok Sindangwangi 2, dalam kelompok ini terdapat 32 kartu keluarga yang mendapat bantuan PKH, yang ke tujuh kelompok Sindangwangi 3, dalam kelompok ini terdapat 33 kartu keluarga yang mendapat bantuan PKH, yang kedelapan kelompok Sindangwangi 4, dalam kelompok ini terdapat 28 kartu keluarga penerima bantuan PKH. Jumlah keseluruhan ada 239 kartu keluarga yang mendapat bantuan PKH di desa ini. Jumlah ini belum termasuk penerima non aktif atau penerima bantuan yang sudah meninggal, sejauh ini diketahui jumlah penerima nonaktif berjumlah 14 kartu keluarga.

Hasil pengamatan di lapangan, jumlah warga khusus penerima bantuan PKH atau keluarga penerima bantuan program keluarga harapan di kampung Palendeng adalah 80 keluarga. Jumlah ini terdiri dari kelompok Palendeng 1, dengan jumlah penerima bantuan sebanyak 33 kartu keluarga, kelompok Palendeng 2, dengan jumlah penerima bantuan sebanyak 22 kartu keluarga dan kelompok suka maju dengan jumlah penerima 25 kartu keluarga.

Namun, dalam proses penyampaian informasi oleh aparat desa dan pendamping PKH serta pendapatan tunai dana bantuan terkadang sering terjadi kesalah pahaman antara penerima bantuan pkh yang satu dengan yang lain. Selain itu, uang yang disalurkan terkadang juga tidak dapat memutus rantai kemiskinan yang terjadi dikarenakan habis untuk kebutuhan dapur sehari-hari.

Karena hal yang telah diuraikan di atas, menjadikan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana sebenarnya proses penyaluran bantuan PKH di kampung Palendeng ini, serta apa bentuk komunikasi dan hambatan yang terjadi dalam proses pemberdayaan masyarakat penerima bantuan PKH di kampung Palendeng.

Untuk itu, peneliti mencoba merumuskan permasalahan yang akan dikaji pada penelitian kali ini, yaitu sebagai berikut:

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalah yang akan dikaji oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyaluran dana program keluarga harapan di Desa Sindangwangi tepatnya di kampung Palendeng?
2. Apa bentuk komunikasi yang dilakukan aparat desa dalam membina keluarga penerima PKH?
3. Apa saja hambatan komunikasi dalam membina keluarga penerima bantuan PKH?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari adanya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses penyaluran dana program keluarga harapan di Desa Sindangwangi tepatnya di kampung Palendeng.
2. Untuk mengetahui bentuk komunikasi yang dilakukan aparat desa dalam membina keluarga penerima PKH.
3. Untuk mengetahui hambatan komunikasi dalam membina keluarga penerima bantuan PKH.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi kelanjutan studi ilmu komunikasi dan penyiaran islam sekaligus penyampaian pesan kepada para pelajar dan masyarakat bahwa pola

komunikasi dalam penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan baik itu yang sifatnya komunikasi antar pribadi maupun komunikasi antar kelompok sangatlah penting untuk terciptanya keberhasilan dalam berkomunikasi.

2. Manfaat Praktis

Saya harap penelitian ini dapat saya manfaatkan untuk melakukan proses komunikasi dengan cara yang lebih baik sehingga meminimalisasi adanya kesalahan pemahaman dalam proses berkomunikasi, terutama dalam proses penyampaian pesan kepada masyarakat.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk mendukung pembahasan yang akan dikaji oleh penulis, maka penulis mencoba melihat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti, yaitu penelitian yang membahas mengenai pola komunikasi serta program keluarga harapan. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik peneliti kali ini adalah:

1. JJIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan) Vol.6 No.6 tahun 2023 oleh Zulkiflimansyah dan Ahmd Yamin. Universitas Teknologi Sumbawa Indonesia. Dalam jurnal berjudul “Pola Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Studi Pada Penerima Manfaat (KPM) Melalui Kegiatan Pertemuan Di Desa Suka Damai”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan teori komunikasi kelompok dan komunikasi persuasif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pendamping telah berhasil membina komunikasi yang efektif dengan menyadari pentingnya komunikator dan pendengar serta mengatasi hambatan komunikasi seperti proses, fisik, dan psikologis.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu membahas proses pembinaan dengan komunikasi yang efektif melalui pertemuan di desa sukadamai dengan teori komunikasi kelompok dan komunikasi persuasif sedangkan peneliti membahas bentuk komunikasi yang digunakan dalam proses pemberdayaan masyarakat penerima bantuan PKH

dengan teori *Excellence in Public Relation* (Standar Kualitas Proses *Public Relation*)

2. Journal of communication Vol.4 No.1 tahun 2019 oleh Siti Noor Fauziyah dan Astri Wulandari. Fakultas Ilmu Komunikasi dan Multimedia Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Dalam jurnal berjudul “Pola Komunikasi Dinas Sosial Kota Yogyakarta dalam Program Keluarga Harapan”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan metode reduksi data, penyajian data dan penyimpulan data. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pola komunikasi antara atasan dan bawahan pada dinas sosial kota Yogyakarta telah terjalin dengan baik, begitu pula kinerja pendamping dinilai sudah cukup baik dalam proses pendampingan. Hanya saja masih ada penerima bantuan PKH yang belum tepat sasaran.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu mengarahkan sasaran penelitian pada usaha menemukan teori dari dasar, deskriptif, dan lebih mementingkan proses daripada hasil selain itu penelitian terdahulu juga dilakukan di dinas sosial kota Yogyakarta, sedangkan penelitian ini menggunakan teori *Excellence in Public Relation* (Standar Kualitas Proses *Public Relation*).

3. Jurnal At-Balagh Vol.3 No.1 tahun 2019 oleh Azhar Sitompul, Fahrul Rizal dan Ahmad Hamdan. Dosen Pascasarjana UIN Sumatera dan Mahasiswa Pascasarjana UIN Sumatera. Dalam jurnal berjudul “Pola Komunikasi Pendamping Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat di Kecamatan Percut Sei Tuan”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yakni reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan, dengan teknik wawancara dan observasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pola komunikasi yang digunakan oleh pendamping PKH adalah pola komunikasi satu arah, dua arah dan pola komunikasi multi arah. Faktor pendukungnya adalah koordinasi yang bagus dari instansi-instansi yang terlibat, sedangkan faktor penghambatnya adalah penyesuaian waktu pertemuan kelompok dan kekurangan jumlah personil dalam melaksanakan tugas.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu membahas komunikasi pendamping PKH yang terjadi di kecamatan Percut Sein Tuan, sedangkan penelitian ini membahas bentuk komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat penerima bantuan PKH dengan teori Komunikasi Organisasi lebih tepatnya teori *Excellence in Public Relation* (Standar Kualitas Proses *Public Relation*).

4. Skripsi oleh Dahlan Nur Busri, dengan judul “Komunikasi Pendamping Program Keluarga Harapan Dalam Mempercepat Graduasi Sejahtera Mandiri Keluarga Penerima Manfaat di Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember”. Adapun perbedaan yang ditemukan dalam penelitian kali ini adalah dalam fokus penelitiannya, penelitian dengan judul “Komunikasi Pendamping Program Keluarga Harapan Dalam Mempercepat Graduasi Sejahtera Mandiri Keluarga Penerima Manfaat di Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember” berfokus dan membahas mengenai proses mempercepat graduasi sejahtera mandiri keluarga yang menerima manfaat dari bantuan PKH, sedangkan judul peneliti membahas mengenai pola komunikasi yang digunakan oleh aparat desa dalam pemberdayaan keluarga yang menerima bantuan PKH dengan teori *Excellence in Public Relation* (Standar Kualitas Proses *Public Relation*).
5. Skripsi oleh Nurhapni mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri An-Raniry, dengan judul “Metode Komunikasi Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Memberikan Informasi Kepada Penerima Bantuan PKH di Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan metode komunikasi informatif, metode komunikasi persuasif, dan metode komunikasi koersif, kesimpulan dari penelitian ini adalah hambatan yang terjadi disini adalah hambatan media, juga hambatan dari penerima PKH itu sendiri yaitu kurangnya keseriusan dari penerima PKH untuk mendengarkan pendamping ketika berkomunikasi serta mudahnya menerima pesan bukan dari pendamping PKH secara langsung.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu menggunakan metode komunikasi informatif, metode komunikasi

persuasif, dan metode komunikasi koersif, sedangkan penelitian ini menggunakan teori teori *Excellence in Public Relation* (Standar Kualitas Proses *Public Relation*).

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu

Judul	Persamaan	Perbedaan
Pola Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Studi pada Penerima Manfaat (KPM) melalui Kegiatan Pertemuan di Desa Suka Damai	Persamaan dari kedua penelitian ini adalah keduanya membahas mengenai pola komunikasi dalam program keluarga harapan	Perbedaan penelitian ini dengan penelelitian terdahulu adalah, terletak pada subjek penelitiannya, penelitian terdahulu di Desa Suka Damai, sedangkan subjek peneliti di Kampung Palendeng
Pola Komunikasi Dinas Sosial Kota Yogyakarta Dalam Program Keluarga Harapan	Persamaan dari kedua penelitian ini adalah keduanya membahas mengenai pola komunikasi dalam program keluarga harapan	Perbedaan penelitian ini dengan penelelitian terdahulu adalah, terletak pada subjek penelitiannya, penelitian terdahulu di Dinas sosial kota Yogyakarta, sedangkan subjek peneliti di Kampung Palendeng

Judul	Persamaan	Perbedaan
<p>Pola Komunikasi Pendamping Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat di Kecamatan Percut Sei Tuan</p>	<p>Persamaan dari kedua penelitian ini adalah keduanya membahas mengenai pola komunikasi dalam program keluarga harapan</p>	<p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah, terletak pada subjek penelitiannya, penelitian terdahulu di Kecamatan Percut Sei Tuan, sedangkan subjek peneliti di Kampung Palendeng</p>
<p>Komunkasi Pendamping Program Keluarga Harapan Dalam Memprcepat Graduasi Sejahtera Mandiri Keluarga Penerima Manfaat di Kecamatan Ledokomo Kabupaten Jember</p> <p>Metode Komunikasi Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Memberikan Informasi Kepada Penerima Bantuan PKH di Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat</p>	<p>Persamaan dari kedua penelitian ini adalah keduanya membahas mengenai komunikasi dalam program keluarga harapan</p> <p>Persamaan dari kedua penelitian ini adalah keduanya membahas mengenai komunikasi dalam program keluarga harapan</p>	<p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah, terletak pada subjek penelitiannya, penelitian terdahulu di Kecamatan Ledokomo Kabupaten Jember, sedangkan subjek peneliti di Kampung Palendeng</p> <p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah, terletak pada subjek penelitiannya, penelitian terdahulu di kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat</p>

Judul	Persamaan	Perbedaan
Daya		Daya, sedangkan subjek peneliti di desa Sindangwangi tepatnya di kampung Palendeng

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini ada lima bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi latar belakang masalah yang menjadi acuan penulis sebagai bahan penelitian dimulai dengan adanya permasalahan yang penulis amati di masyarakat mengenai proses bimbingan masyarakat penerima PKH yang dibimbing oleh aparat desa, adanya kesalah pahaman antara warga penerima bantuan PKH dikampung Palendeng, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA dan LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis akan menjelaskan materi yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti, penulis akan menerangkan mengenai pola komunikasi aparat desa dalam membina keluarga penerima PKH, dengan teori komunikasi organisasi, sedikit penjelasan mengenai teori yang digunakan ini semoga materi yang disampaikan dapat dipahami.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang jenis penelitian, pada kali ini saya menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian yang diambil adalah Kampung Palendeng, Desa Sindangwangi, Muncang, Lebak, Banten. Subjek penelitian penulis kali ini adalah bapak lurah Desa Sindangwangi yaitu, Bapak Aup Ma'rup, pendamping PKH Desa Sindangwangi, yaitu Bapak Jajang, Aparat Desa

Sindangwangi Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Desa Bpak Karman, dan juga beberapa warga masyarakat penerima bantuan PKH. Sumber dan jenis data dalam penelitian ini dihasilkan dari wawancara, buku, jurnal, skripsi yang berkaitan dengan materi penelitian. Teknik pengumpulan data, dan teknik pengolahan data.

BAB IV ANALISIS DATA dan PEMBAHASAN

Bab ini akan menerangkan masalah penulis yang diselesaikan dengan cara, reduksi data, penyajian data hingga proses penarikan kesimpulan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang dihasilkan dari proses penelitian.